

REORGANISASI AGRARIA DI YOGYAKARTA TAHUN 1918-1926

Oleh: **Mudji Hartono, M. Hum.**

ABSTRAK

Reorganisasi Agraria di Yogyakarta adalah penataan kembali sistem kepemilikan tanah dan penguasaan tanah di Yogyakarta. Berdasarkan teori Vorsten Domein dari Rouffaer bahwa raja (Sultan) adalah pemilik tanah di seluruh kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahannya Sultan dibantu oleh para birokrat yang terdiri dari para *sertana dalem*, *abdi dalem*, dan *priyayi*. Atas jasa-jasanya para birokrat diberi gaji yang berupa tanah yang disebut tanah *Apanage* (lungguh) atau tanah jabatan. Para pemegang tanah lungguh itu disebut *patuh*. Dalam mengelola tanah itu *patuh* mengangkat *bekel* yang bertugas menarik pajak dari penduduk (*petani*) yang menggarap tanah tersebut.

Reorganisasi Agraria disebut juga "Konversi tanah" atau Reformasi Agraria. Hal ini dikarenakan reorganisasi pada dasarnya merupakan pengalihan dan pemindahan hak atas tanah dari Sultan sebagai pemilik tanah seluruh kerajaan kepada rakyat. Selain itu disebut reformasi administrasi dan Agraria, karena sebelum reorganisasi kepemilikan dan penguasaan tanah tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Maka setelah reorganisasi kepemilikan dan penguasaan tanah memiliki dasar hukum yang jelas. Tanah dapat dipindahkan haknya dari pemilik lama kepada pemilik baru melalui transaksi jual beli, sewa menyewa, hibah dan sebagainya. Kebijakan reorganisasi agraria pada hakekatnya merupakan desakan dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Sultan Yogyakarta agar melakukan perubahan sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta yang dikenal dengan sistem *Apanage*. Selanjutnya, Sultan menerima tuntutan pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian rakyat mempunyai hak milik (*anderbe*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Sultan menerima desakan tersebut untuk melakukan reorganisasi agraria. Selain itu juga untuk mengetahui proses pelaksanaan reorganisasi agraria di Yogyakarta beserta dampak yang ditimbulkan oleh reorganisasi agraria tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah kritik. Yang terdiri dari empat tahap yaitu: pertama *heuristik*, yakni tahap pencarian dan pengumpulan sumber. kedua tahap kritik sumber atau verifikasi, yang terdiri dari kritik ekstern yang bertujuan untuk menentukan sumber yang otentik dan kritik intern yang bertujuan untuk menentukan kredibilitas sumber. Ketiga *interpretasi*, yaitu tahap penafsiran terhadap fakta-fakta. Keempat adalah tahap sintesis, yaitu tahap penulisan dengan cara menyatukan atau menghubungkan fakta satu dengan yang lain menjadi kisah sejarah.

Kata Kunci: *Agraria, Reorganisasi, Yogyakarta*